BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa krisis geopolitik energi di kawasan Eropa pasca-invasi Rusia ke Ukraina 2022 memiliki dampak yang signifikan terhadap keamanan energi Polandia. Sebagai negara yang selama bertahun-tahun sangat bergantung pada pasokan energi Rusia, Polandia dihadapkan pada tantangan untuk mengamankan pasokan energi sekaligus menjaga keberlanjutan transisi energi. Dengan menggunakan kerangka konseptual energy security oleh Daojiong Zha dalam buku yang berjudul An Introduction to Non-Traditional Security Studies: A Transnational Approach yang diedit oleh Mely Caballero Anthony, peneliti menemukan hasil penelitian yang dapat dirangkum berdasarkan tiap dimensi keamanan energi.

Dalam security of supply, Polandia secara aktif melakukan diversifikasi pasokan energi guna mengurangi ketergantungan pada Rusia. Langkah konkret termasuk pembangunan *Baltic Pipe* dari Norwegia melalui Denmark, penyelesaian interkoneksi gas lintas negara (GIPL 2022 dan Polandia–Slovakia 2023), serta perluasan Terminal LNG Świnoujście dan rencana FSRU di Gdańsk. Selain itu, Polandia memperluas kapasitas penyimpanan gas bawah tanah di Wierzchowice untuk memenuhi standar UE minimal 90 hari cadangan.

Di sisi *security of demand*, Polandia melaksanakan kebijakan pengelolaan permintaan energi melalui efisiensi dan penghematan. Salah satunya adalah partisipasi dalam kebijakan Uni Eropa untuk mengurangi konsumsi gas sebesar

15% pada 2022–2023, diiringi kampanye efisiensi energi dan dukungan bagi rumah tangga menghadapi *energy poverty*. Mekanisme *demand response* dan program elektrifikasi transportasi juga menjadi bagian dari strategi mengelola kebutuhan energi.

Pada *security as sustainability*, pemerintah Polandia mendorong pengembangan energi terbarukan seperti surya, angin, biomassa, dan hidrogen. Program *Mój Prąd* berhasil meningkatkan kapasitas fotovoltaik hingga >10 GW pada 2022, sementara Offshore Wind Act 2020 menargetkan 11 GW kapasitas angin lepas pantai pada 2040. Pemerintah juga melonggarkan regulasi "10H" untuk menghidupkan kembali investasi angin darat. Bersamaan dengan itu, strategi hidrogen 2030 menjadi tonggak untuk menjamin ketersediaan sumber energi baru di masa depan.

Dalam security as affordability, untuk menjaga keterjangkauan energi, Polandia menerapkan berbagai bentuk subsidi energi rumah tangga, termasuk dukungan finansial bagi pengguna listrik dan gas di tengah lonjakan harga pasca-2022. Pemerintah mengeluarkan skema kompensasi harga energi, program renovasi bangunan, dan dukungan termal bagi kelompok rentan untuk mengurangi dampak sosial-ekonomi dari krisis energi.

Pada dimensi terakhir yaitu *security as sustainability*, Polandia berkomitmen mengikuti target dekarbonisasi Uni Eropa. Dalam NECP dan PEP2040, Polandia menargetkan porsi energi terbarukan hingga 23% pada 2030 dan mempercepat transisi menuju netralitas karbon pada 2050. Meski masih mengandalkan batu bara (lebih dari 55% bauran listrik pada 2022), langkah-

langkah diversifikasi, pengembangan energi bersih, serta rencana pembangunan PLTN pada 2033/2035 menunjukkan keseriusan dalam mengamankan energi berkelanjutan.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan Polandia dalam menghadapi krisis energi mencakup bauran antara kebijakan jangka pendek (efisiensi energi, subsidi) dan kebijakan jangka panjang (diversifikasi pasokan, energi terbarukan, dan tenaga nuklir).

5.2 Saran

Krisis energi telah menjadi ancaman eksistensial Polandia yang terjadi karena ketergantungan impor energi Rusia yang tinggi. Ketika Rusia menginvasi Ukraina pada Februari 2022 hal ini membuat adanya ketegangan geopolitik dan berdampak terhadap sektor energi Polandia. Ketegangan geopolitik yang berdampak terhadap sektor energi ini membuat Polandia harus menjaga keamanan energinya baik itu dari segi pasokan, permintaan hingga keberlanjutan. Terkait dengan penelitian selanjutnya, disarankan untuk melihat isu ini dari kacamata tata kelola energi yang membahas bagaimana kerja sama antara aktor-aktor negara dan non-negara dalam menghadapi krisis energi dan ketegangan geopolitik yang terjadi. Diharapkan penelitian yang dihasilkan nantinya lebih solutif dan bervariatif.